DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Rohman*, Dasar-Dasar Manajemen*, Inteligensia, Malang*,* 2017.

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ṣawm, Bab 55, Hadis No. 1968.

Ahmad Ghufron, SH dan Drs Sudarsono, SH, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT Melton Putra, Jakarta, 1991.

A.S. Monir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap pembinaan kepegawaian*,Gunung Agung, Jakarta,1983.

Bahder Johan Nasution “ Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai pemikiran Modern.” Yustisia, Vol.3, 2014.

CTS Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawain Republik Indonesia*,Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Elim Riedek Chrismast Pio “Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya”, Lex Administratum, Vol. 6, 2018.

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

Mohamad, Ismail, *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Muchsan, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014.

Rosadakarya Musanef, Administrasi Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta, 2007.

Sentot Imam Wajono, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Salemba Empat, Jakarta 2015.

Sedarmayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan*, Grasindo, Jakarta, 2005.

SF.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Sri Hartini dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Ulfa Hidayati, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Cendekia Publisher, Makassar, 2020,

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286.

Jurnal

Arif Setiyanto dkk " Pembuatan Sistem Informasi Cuti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Menggunakan PHP dan MySQL" *Jurnal Teknik Pomits*, Vol.2, 2013.

Ade Hermawan dan Linda Puspaningsih "Pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun pada Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.", *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial ,* Vol. 8.

Elim Riedek Chrismast Pio " Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya", *Lex Administratum,* Vol. 6, 2018.

I Gde Suranaya Pandit " Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2, 2023.

Inci Abdul Yatim, Bambang Supriyono, Imam Hardjanto " Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Melalui Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan", *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora,* Vol. 17, 2014.

Garda Yustisia, Fatma Ulfatun "Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", Jurnal Gema Keadilan, Vol 9 Edisi I, 2022.

Restu Fauzi Lesmana,Lita Lestari Utami "Pembangunan sistem informasi manajemen cuti karyawan berbasis web pada PT Sarana Kreasindo Teknologi, *Jurnal Tika*, Vol.9, 2024.

Ridwan Arifin “Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What exactly. Is justice”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 7, 2022.

Sedarmayanti Sedarmayanti, Gusti Nella Resna Dakhi “ Persepsi mengenai promosi jabatan struktural PNS perempuan di Pemerintah Kota Gunungsitoli” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 14, 2017.

S. Suhada, R. Nasrlloh “ Kajian praktis analisis jabatan dan analisis beban kerja up perparkiran DKI Jakarta” Jurnal Ilmiah Hospitality.

Sukoariyah Sri Puji Astuti “ Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol.2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2014) tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo PP 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN Nomor 17 Tahun 2021.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/isteri) berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Rini S.E, Analis SDM ahli muda Kanreg 1 BKN di Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2026.

Wawancara dengan Pak Ari Wibowo, Kasubag kepegawaian Kanreg 1 BKN di Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2026.

Media Elektronik

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Surat Menteri PANRB tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami

atau Isterinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakli Presiden" terdapat dalam *https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/surat-menteri-panrb-tentang-ketentuan-bagi-asn-yang-suami-atau-isterinya-menjadi-calon-kepala-daerah-wakil-kepala-daerah-calon-anggota-legislatif-dan-calon-presiden-wakli-presiden*,terakhir diakses pada 8 Desember 2025.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara yang suami atau istrinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota legislatif, presiden/wakil presiden. Terpadat dalam https://www.kpu.go.id/berita/baca/5461/Surat-Nomor-B-36-M.SM.00.00-s018-tanggal-2-Februari-2018-perihal-Ketentuan-bagi-ASN-yang-Suami-atau-Istrinya-Menjadi-Calon-Kepala-Daerah-Wakil-Kepala-Daerah--Calon-Anggota-Legislatif--dan-Calon-Presiden-Wakil-Presiden. . Terakhir aksesk tanggal 8 Desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam https://kbbi.web.id/cuti. Terakhir diakses tanggal 24 April 2026.

Cek Batas Usia Pensiun PNS Berdasarkan Jenis Jabatan, terdapat dalam https://www.bkn.go.id/cek-batas-usia-pensiun-pns-berdasarkan-jenis-jabatan/ diakses pada 1 Mei

Pemberian, Perpanjangan, Pengaktifan Kembali CLTN terdapat dalam https://pekanbaru.bkn.go.id/home/pemberian-perpanjangan-pengaktifan-kembali-cltn/ diakses pada 19 Mei 2026.

Peraturan Baru BKN: Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi PNS terdapat dalam https://setkab.go.id/peraturan-baru-bkn-cuti-karena-alasan-penting-dan-cuti-di-luar-tanggungan-negara-bagi-pns/# diakses pada 9 Mei 2016